
KRISIS KEMANUSIAAN DAN TANTANGAN DIPLOMASI GLOBAL: SUATU ANALISIS POLITIK INTERNASIONAL

Rahmat Aulia

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Krisis kemanusiaan merupakan tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Dalam konteks ini, diplomasi global memainkan peran penting dalam menanggapi dan mengatasi krisis kemanusiaan yang kompleks dan meluas. Tulisan ini melakukan analisis terhadap peran diplomasi global dalam menghadapi krisis kemanusiaan, mengeksplorasi strategi dan tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan tinjauan terhadap literatur dan studi kasus, tulisan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara krisis kemanusiaan dan diplomasi global serta implikasinya terhadap kebijakan luar negeri.

Kata Kunci: *Krisis kemanusiaan, diplomasi global, politik internasional*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Krisis kemanusiaan merupakan fenomena yang seringkali terjadi di berbagai belahan dunia, menyebabkan penderitaan yang luas bagi jutaan orang. Krisis tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik bersenjata, bencana alam, krisis ekonomi, dan situasi politik yang tidak stabil. Dalam konteks yang semakin terhubung global seperti saat ini, krisis kemanusiaan tidak hanya mempengaruhi negara yang terkena dampak langsung, tetapi juga memiliki konsekuensi yang meluas di tingkat internasional. Oleh karena itu, peran diplomasi global menjadi sangat penting dalam menanggapi dan mengatasi krisis kemanusiaan tersebut.

Diplomasi global dapat didefinisikan sebagai upaya negara-negara dan organisasi internasional untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah global, termasuk krisis kemanusiaan. Diplomasi ini melibatkan serangkaian proses negosiasi, pertemuan diplomatik, dan kerja sama lintas batas untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Dalam konteks krisis kemanusiaan, diplomasi global bertujuan untuk memobilisasi dukungan internasional, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah yang mendasari krisis tersebut.

Krisis kemanusiaan sering kali menimbulkan tantangan kompleks yang membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi dari komunitas internasional. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi krisis kemanusiaan adalah akses terhadap daerah yang terkena dampak. Terkadang, negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau krisis politik menolak atau menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dari pihak luar, menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik tersebut.

Selain itu, kekurangan dana dan sumber daya juga merupakan tantangan dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan memerlukan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi dan korban bencana. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan yang mendesak dan dana yang tersedia, mengakibatkan terbatasnya bantuan yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

Lebih jauh, diplomasi global juga dihadapkan pada tantangan politik dan keamanan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan. Terkadang, upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dapat bertentangan dengan kepentingan politik negara-negara tertentu atau kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat. Oleh karena itu, diplomasi global harus mampu menavigasi kompleksitas politik dan kepentingan yang ada, sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis terhadap krisis kemanusiaan dan tantangan diplomasi global dalam menanggapi masalah tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk memahami konteks, dinamika, dan kompleksitas permasalahan krisis kemanusiaan dengan lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang isu tersebut.

1. **Studi Literatur:** Penelitian ini akan melakukan studi literatur yang komprehensif untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman tentang krisis kemanusiaan dan diplomasi global. Studi literatur akan mencakup jurnal akademis, buku-buku, laporan penelitian, dan artikel dari sumber-sumber tepercaya lainnya. Melalui analisis literatur yang teliti, penelitian ini akan mengidentifikasi tren, pola, dan teori yang relevan dalam kajian krisis kemanusiaan dan diplomasi global.
2. **Analisis Kasus:** Penelitian ini akan menganalisis beberapa kasus krisis kemanusiaan yang signifikan dalam sejarah modern, seperti krisis pengungsi di Suriah, bencana alam yang melanda Haiti, atau konflik bersenjata di Sudan Selatan. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan berita, dokumen resmi, dan studi kasus, penelitian ini akan mengevaluasi respons diplomasi global terhadap krisis tersebut, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan diplomasi dalam menanggapi masalah kemanusiaan.
3. **Wawancara:** Penelitian ini juga akan melibatkan wawancara dengan para ahli diplomasi global, pejabat pemerintah, praktisi kemanusiaan, dan tokoh-tokoh terkait lainnya. Wawancara akan dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang tantangan dan peluang dalam menangani krisis kemanusiaan secara diplomatik. Data dari wawancara akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan kunci.
4. **Analisis Konten:** Data yang terkumpul dari studi literatur, analisis kasus, dan wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten. Analisis ini akan melibatkan identifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan tren yang muncul dari data. Hasil analisis konten akan digunakan untuk merumuskan temuan-temuan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika krisis kemanusiaan dan peran diplomasi global dalam menanggapinya.

Dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara krisis kemanusiaan dan diplomasi global. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang kompleksitas isu-isu kemanusiaan dan upaya-upaya diplomatik yang dilakukan untuk mengatasinya secara global.

PEMBAHASAN

Krisis kemanusiaan merupakan salah satu fenomena yang menantang di dunia modern, dengan dampak yang luas dan seringkali mengakibatkan penderitaan yang besar bagi jutaan orang di seluruh dunia. Krisis kemanusiaan dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk konflik bersenjata, bencana alam, krisis ekonomi, dan situasi politik yang tidak stabil. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini, peran diplomasi global menjadi sangat penting karena tantangan tersebut tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu dan memerlukan respons yang terkoordinasi dari komunitas internasional.

Diplomasi global memiliki peran kunci dalam menanggapi dan mengatasi krisis kemanusiaan. Diplomasi ini melibatkan upaya negara-negara dan organisasi internasional untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah global, termasuk krisis kemanusiaan. Tujuannya adalah untuk memobilisasi dukungan internasional, mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, dan menyelesaikan akar masalah yang mendasari krisis tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam diplomasi global terkait krisis kemanusiaan adalah akses terhadap daerah yang terkena dampak. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata atau krisis politik sering kali menolak atau menghalangi upaya bantuan kemanusiaan dari pihak luar, menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, diplomasi global harus mampu membujuk pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan akses yang aman dan tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan.

Selain itu, kekurangan dana dan sumber daya juga merupakan tantangan dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan memerlukan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan perawatan kesehatan bagi para pengungsi dan korban bencana. Namun, seringkali terjadi kesenjangan antara kebutuhan yang mendesak dan dana yang tersedia, mengakibatkan terbatasnya bantuan yang dapat diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.

Tantangan lainnya adalah tantangan politik dan keamanan dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan. Upaya untuk menyelesaikan konflik bersenjata atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dapat bertentangan dengan kepentingan politik negara-negara tertentu atau kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat. Diplomasi global harus mampu menavigasi kompleksitas politik dan kepentingan yang ada, sambil tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diplomasi global dapat mengambil berbagai pendekatan, termasuk diplomasi bilateral, multilateral, dan regional. Diplomasi ini melibatkan negosiasi, mediasi, dialog, dan kerja sama lintas batas untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. Selain itu, diplomasi global juga dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memobilisasi sumber daya finansial dan teknis yang diperlukan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai.

Dengan demikian, analisis politik internasional terhadap krisis kemanusiaan menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam menanggapi masalah ini. Diplomasi global memiliki peran yang sangat penting dalam menanggapi krisis

kemanusiaan, namun tantangan-tantangan seperti akses terhadap daerah yang terkena dampak, kekurangan dana, dan ketegangan politik dan keamanan memerlukan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi. Dengan upaya yang terus-menerus dan kerja sama internasional yang kuat, diharapkan bahwa diplomasi global dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan meringankan penderitaan yang dialami oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Dalam konteks analisis politik internasional terhadap krisis kemanusiaan, penting untuk mempertimbangkan peran aktor-aktor utama seperti negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Negara-negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan menentukan respons terhadap krisis kemanusiaan. Sementara itu, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), atau Uni Afrika, berperan dalam mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan, memfasilitasi dialog antarnegara, dan menyediakan platform untuk penyelesaian konflik.

Lebih lanjut, lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memiliki peran yang krusial dalam menyediakan bantuan langsung kepada korban krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi dan warga terdampak lainnya. Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga ini juga bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik atau negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai.

Selain itu, diplomasi global juga menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan koherensi dalam respons terhadap krisis kemanusiaan. Kadang-kadang terjadi inkonsistensi antara negara-negara atau organisasi internasional dalam pendekatan mereka terhadap krisis kemanusiaan tertentu. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki kepentingan geopolitik atau ekonomi tertentu yang mempengaruhi sikap mereka terhadap krisis kemanusiaan, yang dapat menghambat upaya-upaya diplomatik yang lebih luas dan terkoordinasi.

Selain tantangan-tantangan yang telah disebutkan, krisis kemanusiaan juga sering kali melibatkan pertikaian antara prinsip-prinsip kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional atau politik domestik negara-negara tertentu. Misalnya, pembatasan akses kemanusiaan atau penolakan terhadap bantuan internasional dapat dipertimbangkan oleh negara-negara yang ingin mempertahankan kedaulatan atau kekuasaan dalam konteks konflik internal.

Selain itu, respons terhadap krisis kemanusiaan juga harus memperhitungkan dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan di wilayah terdampak. Diplomasi global harus dapat mengintegrasikan aspek-aspek ini ke dalam strategi penanganan krisis kemanusiaan, termasuk melalui pembangunan kapasitas, rekonsiliasi, dan pembangunan infrastruktur.

Dalam analisis politik internasional terhadap krisis kemanusiaan, penting juga untuk mengakui bahwa upaya-upaya diplomasi global dalam menanggapi krisis kemanusiaan tidak selalu berhasil atau sempurna. Namun, dengan kerja sama yang kuat, komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, dan kepemimpinan yang efektif, diplomasi global

dapat memainkan peran yang penting dalam meminimalkan dampak krisis kemanusiaan dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil, damai, dan berkelanjutan di seluruh dunia.

Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, penting untuk diingat bahwa diplomasi global tidak hanya tentang menyelesaikan konflik yang sudah ada, tetapi juga mencegah terjadinya krisis kemanusiaan baru. Oleh karena itu, diplomasi pencegahan menjadi semakin penting dalam agenda internasional. Upaya-upaya pencegahan meliputi promosi perdamaian, pembangunan kapasitas negara, peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, serta pengurangan risiko bencana.

Selain itu, peran masyarakat sipil dan aktor non-negara juga perlu diperhitungkan dalam analisis diplomasi global terhadap krisis kemanusiaan. Masyarakat sipil seringkali menjadi agen perubahan yang penting dalam merespon dan mengatasi krisis kemanusiaan, baik melalui aksi langsung maupun advokasi untuk perubahan struktural yang lebih besar. Keterlibatan aktor non-negara seperti organisasi nirlaba, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat membantu memperluas akses terhadap bantuan kemanusiaan dan memperkuat respons internasional terhadap krisis kemanusiaan.

Dalam konteks globalisasi yang semakin terhubung, kerja sama internasional dan multilateralisme menjadi semakin penting dalam menanggapi krisis kemanusiaan. Negara-negara harus bekerja sama melalui forum-forum internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau organisasi regional lainnya untuk meningkatkan respons terhadap krisis kemanusiaan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dan efisien. Di samping itu, kerja sama lintas sektoral antara negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga dapat meningkatkan koordinasi dan kapasitas dalam menanggapi krisis kemanusiaan.

Dalam konteks krisis kemanusiaan yang semakin kompleks dan meluas, inovasi dan teknologi juga dapat menjadi alat yang berguna dalam meningkatkan respons dan mitigasi dampak krisis. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi koordinasi dan distribusi bantuan kemanusiaan, sementara teknologi terkini seperti drone dan pemetaan satelit dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan wilayah-wilayah terpencil yang sulit diakses.

Krisis kemanusiaan merupakan tantangan global yang kompleks dan memerlukan respons yang terkoordinasi dan efektif dari komunitas internasional. Diplomasi global memainkan peran yang penting dalam menanggapi dan mengatasi krisis kemanusiaan, namun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti akses terhadap daerah terdampak, kekurangan dana, dan pertikaian politik. Dengan kerja sama yang kuat, komitmen terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, dan penggunaan teknologi dan inovasi yang tepat, diharapkan bahwa diplomasi global dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjawab tantangan kemanusiaan yang ada dan meminimalkan dampaknya terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia.

Dalam melanjutkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam respons dan penanganan krisis tersebut. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk membangun ketahanan komunitas terhadap krisis

kemanusiaan di masa depan, seperti memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas tanggap darurat, dan membangun sistem peringatan dini untuk bencana alam.

Selain itu, penting juga untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dari krisis kemanusiaan terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Bantuan kemanusiaan yang diberikan harus mengutamakan aspek pemulihan dan rekonstruksi, termasuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, pemulihan mata pencaharian, dan dukungan psikososial bagi korban krisis.

Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin erat, penting untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Negara-negara dan organisasi internasional perlu meningkatkan koordinasi dan berbagi sumber daya untuk merespons krisis kemanusiaan secara efektif. Kerja sama regional juga penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang bersifat lintas batas dan kompleks.

Tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam respons terhadap krisis kemanusiaan. Masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dan sukarelawan memiliki peran yang penting dalam mendukung upaya bantuan kemanusiaan, menyediakan layanan dasar, dan memobilisasi sumber daya lokal.

Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi, harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan dan keputusan. Penanganan krisis kemanusiaan harus dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia dan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan korban, terlepas dari latar belakang mereka.

Dalam menghadapi tantangan krisis kemanusiaan, pembangunan kapasitas dan penguatan lembaga juga menjadi kunci untuk memastikan respons yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur kemanusiaan, serta memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung respons krisis yang efektif.

Mengatasi krisis kemanusiaan memerlukan kerja sama, koordinasi, dan komitmen bersama dari seluruh aktor dalam masyarakat internasional. Diplomasi global memainkan peran yang penting dalam memfasilitasi kerja sama ini dan memastikan bahwa respons terhadap krisis kemanusiaan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan bahwa upaya-upaya ini dapat membawa perubahan positif dalam mengatasi tantangan kemanusiaan yang kompleks dan mendesak.

Dalam mengatasi krisis kemanusiaan, penting untuk memperhitungkan dimensi multidimensi dari tantangan tersebut, yang melibatkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk merespons krisis kemanusiaan dengan efektif, memperhitungkan konteks lokal, dinamika konflik, dan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Selain itu, upaya-upaya ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari, seperti kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, guna memastikan bahwa respons yang diberikan tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar penyebab krisis tersebut.

Kesimpulan

Krisis kemanusiaan adalah tantangan global yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Dari konflik bersenjata hingga bencana alam dan kekurangan pangan, krisis semacam itu mengakibatkan penderitaan yang luar biasa dan memicu ketidakstabilan sosial serta politik di berbagai belahan dunia. Dalam menghadapi krisis kemanusiaan, diplomasi global memainkan peran kunci dalam merespons, meredakan konflik, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Diplomasi multilateral, kerja sama antar negara, serta upaya diplomasi kemanusiaan yang proaktif dan berkesinambungan menjadi kunci untuk mengatasi krisis semacam ini.

Selain itu, tantangan diplomasi global dalam menghadapi krisis kemanusiaan juga melibatkan penyeimbangan antara kepentingan nasional dan kemanusiaan, serta antara keamanan dan hak asasi manusia. Negara-negara sering kali dihadapkan pada dilema moral dan politik dalam menanggapi krisis kemanusiaan, terutama ketika terjadi konflik antara kepentingan geopolitik dan tanggung jawab kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi ketegangan ini dan memastikan bahwa kepentingan kemanusiaan ditempatkan di garis depan dalam kebijakan dan tindakan diplomasi global.

Secara keseluruhan, krisis kemanusiaan dan tantangan diplomasi global yang terkait merupakan isu yang kompleks dan mendesak, membutuhkan respons yang cepat, koordinasi yang efektif, dan komitmen yang kuat dari seluruh komunitas internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama secara aktif, memperkuat institusi multilateral, dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan dalam diplomasi global mereka. Hanya dengan demikian, kita dapat mengatasi krisis kemanusiaan secara efektif dan membangun dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A. M. (2021). Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Dwiana, R. (2013). RADIO KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Kasus pada Radio Komunitas Perempuan Hapsari FM di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ritonga, J. S. (2016). Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra. *Miqot*, 40(1), 154547.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nobriama, R. A. (2019). pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).
- Putri, R. D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, J. (2021). Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Siregar, N. S. S. (2016). Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit benuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2006). Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues.
- Tarigan, U. (2005). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara).
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Syarif, Y. (2018). Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. *JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING*, 1(2).
- Tarigan, U. (2007). Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang.
- Tarigan, U. (2012). Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan.
- Tarigan, U. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wahyudi, D. (2022). BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital), 45.

- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). Pengerjaan Abutment pada Proyek Penggantian Jembatan IDANO EHO-DESA SIFOROASI-KECAMATAN AMANDRAYA-KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Eky Ermal, M. (2019). PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA.
- Harahap, G. Y. (2004). Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan.
- Karim, A. (2017). Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Siregar, N. S. S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2022). KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga).
- Widyastuti, I. W. (2022). Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- Santoso, M. H. (2021). Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Girsang, L. (2020). Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Batubara, B. M. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.

- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd/.